

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PEDURUNGAN

Oleh:

Niken Septihandini Puspaningtyas, Hardi Warsono, Aufarul Marom

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Public participation is an important aspect in the success of the government's development program. Family planning is one government program that aims to control the number of residents with a way to control birth spacing and limiting births. Another goal of family planning is to improve the quality of future generations. In the family planning programs in Sub-district Pedurungan, public participation is a form of public awareness to share the support of one of the national government's programs in an effort to control the population and improving the quality of human resources. Technical Implementation Unit of Bapermasper and KB (UPTB) Sub-district Pedurungan which is representative of bapermasper and KB Semarang acts as a supervisor, executive and government officials who deal with matters of family planning in Sub Pedurungan. The purpose of this research is to see the form of community participation in family planning programs, the level of community participation in family planning programs and the factors that influence community participation in planning programs in Sub-district Pedurungan. The results of this research are the form of community participation in family planning programs in Sub Pedurungan is pseudo participation. Levels of community participation is at the level of tokenism and there are three factors that affect the participation of the six factors studied . Factors affecting the society is education background , gender and external factors comes from the government

Keywords: Participation, Public, Family Planning Program

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemasalahan mengenai laju pertumbuhan penduduk di suatu negara merupakan suatu hal yang harus diperhatikan secara serius, karena bila terjadi laju pertumbuhan penduduk yang besar dan tidak terkendali akan

menimbulkan berbagai masalah kompleks lainnya yang dapat mengganggu proses pembangunan suatu negara

Di Indonesia masalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata merupakan malah tersendiri. Kondisi penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun dianggap tidak

menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan.

Maka Pemerintah Indonesia mencanangkan sebuah Program yang diharapkan mampu mengatasi atau setidaknya menekan sejumlah permasalahan terkait laju penduduk yang tidak seimbang bernama keluarga berencana (disingkat KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an.

Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk yang beragam. Dari 16 kecamatan tersebut salah satunya adalah Kecamatan Pedurungan Kecamatan Pedurungan ini memiliki penduduk yang padat dan partisipasi KB yang cukup rendah di Kota Semarang. Dengan gambaran ini sebagai salah satu kecamatan yang letaknya tepat di perkotaan dari ibu kota provinsi ternyata masih banyak PUS di Kecamatan Pedurungan yang belum terlayani meskipun sebenarnya mereka tidak ingin punya anak lagi ataupun juga ingin menunda kehamilan, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi dan ini tentunya menjadi suatu catatan tersendiri mengapa PUS ingin menunda tetapi tidak mengikuti program KB. Apabila hal ini tidak diperhatikan jelas dapat mempengaruhi pencapaian program KB. Dan disisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Pelaksanaan dan pengawasan KB yang dilakukan oleh Bapermasper dan KB pada jenjang kecamatan. Karena kualitas dan

akses pelayanan merupakan suatu hal yang dinamis dan menuntut kepada suatu perubahan paradigma terutama di kalangan Penyelenggara dan pengawas Pelayanan yaitu Bapermasper dan KB. Itulah sebabnya pelayanan harus dilaksanakan atas dasar kesukarelaan, keterbukaan, dan kejujuran. Para pegawai Bapermasper dan KB harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan setiap alat kontrasepsi secara benar dan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dalam perpektif yang lebih luas, persoalan kependudukan tidak hanya berhubungan dengan jumlah anak, sebab aspek yang terkait di dalamnya sebenarnya sangat beragam dan variatif. Respons terhadap hal ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, Akan tetapi respon tersebut masih belum menyentuh persoalan mendasar yang ada di dalamnya sehingga isu-isu tersebut belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Jika di lihat hasil dari Kebijakan kependudukan tentang program KB pada masa orde baru meskipun dari sisi kuantitatif telah menunjukkan kemajuan yang berarti, namun masih meninggalkan beberapa hambatan lain yang berkembang di lapangan. Hal ini menjadi agenda penting bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap isu-isu mendasar yang berkembang di masyarakat. Maka dari itu dengan berpedoman latar belakang tersebut, penulis mengambil penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pedurungan”**.

B. TUJUAN

1. Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Bapermasper dan KB di Kecamatan Pedurungan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang telah dilakukan oleh Bapermasper dan KB Kecamatan Pedurungan.

C. TEORI

1) Partisipasi

Menurut Charly (Ainur Rohman, 2009:46), partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya.

2) Bentuk Partisipasi

1. Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan
2. Penerimaan manfaat secara merata.
3. Pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program pembangunan sosial dan ekonomi.

Mengacu pada pandangan ini, partisipasi dibedakan menjadi dua hal, *authentic participation* (partisipasi otentik) yang merujuk pada terpenuhinya ketiga kriteria tersebut. Jika seluruh kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi maka hal ini akan disebut *pseudo participation* (partisipasi semu) (Ainur Rohman, 2009 : 50).

3) Tingkatan Partisipasi

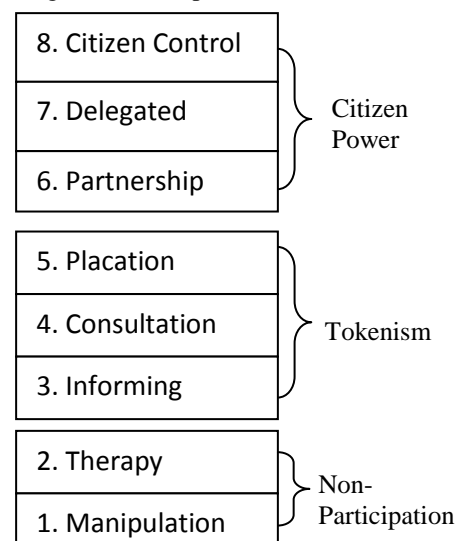
Sherry R Arnstein (Ainur Rohman, 2009 : 47) membuat skema tingkatan partisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan. Ada tiga tingkat utama dan delapan sub-tingkatan, yaitu:

- a. *Citizen control*: yaitu masyarakat mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya.
- b. *Delegated power*: Berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri

beberapa keperluannya dalam suatu program pembangunan.

- c. *Partnership*: adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam program pembangunan.
- d. *Placation*: melibatkan warga untuk menjadi anggota komite dalam program namun hak memutuskan tetap berada pada pemerintah
- e. *Consultation*: Adanya komunikasi dua arah seperti survey sikap, pertemuan warga, dan dengar pendapat.
- f. *Information*: Hanya ada komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat seperti pengumuman, pamflet, poster, laporan tahunan.
- g. *Therapy* : Bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi melainkan untuk mendidik rakyat.
- h. *Manipulation* : Masyarakat diarahkan agar tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya diarahkan untuk berperan serta.

Tingkatan Partisipasi Menurut Arnstein



Sumber : dalam Ainur Rohman, 2009 : 47

4) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Plumer (slamet, 1994 : 97), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

a. Pengetahuan dan keahlian

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahamsi ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

b. Pekerjaan masyarakat

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasarpada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

c. Tingkat pendidikan dan buta huruf

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

d. Jenis kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu.

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang

digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

f. Faktor-faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

D. METODE

1) Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam metode ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan demikian data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara (*interview guide*) meliputi transkrip interview (wawancara), catatan lapangan, foto dan dokumen pribadi.

2) Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah di kantor Unit Pelaksana Teknis Bapermasper dan KB (UPTB) Kecamatan pedurungan.

3) Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan, yaitu pegawai UPTB Kecamatan Pedurungan dan pasangan usia subur (PUS) di Kecamatan Pedurungan.

4) Jenis Data

Jenis data yang digunakan meliputi data teks / tulisan, data statistik, data gambar dan kata-kata tertulis berupa hasil wawancara.

5) Sumber Data

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya buku, artikel, dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang dilakukan untuk memperoleh data-data, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Interview atau wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi
- d. Studi kepustakaan

7) Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, kesimpulan sampai pada koding kategorisasi dan penafsiran data.

8) Kualitas Data

Teknik untuk menguji keabsahan data adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah dipahami secara benar oleh peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan informan. Dengan cara, antara lain (Meoleong, 2007:33):

- a. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
- b. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan satu dengan yang lainnya dengan hasil observasi di lapangan.
- c. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan tingkatan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara, wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka, diperoleh tujuan dari penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan menggunakan teori bentuk partisipasi, tingkatan partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi.

a. Bentuk Partisipasi

1. Sumbangsih / bantuan masyarakat terhadap program. Yaitu bantuan yang berasal dari masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan program. Bantuan disini bisa berupa ide, sara, kritik, waktu, dan materi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan faktor bantuan dari masyarakat terhadap program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan sudah terpenuhi.

2. Pemanfaatan program secara merata. Yaitu masyarakat secara merata telah merasakan manfaat program. Dari hasil penelitian, faktor pemanfaatan program secara merata belum terpenuhi karena hanya masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi yang dapat merasakan manfaat program keluarga berencana dan masyarakat yang belum berpartisipasi pun belum merasakan manfaat.

3. Pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program. Yaitu pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung program. Dari penelitian, faktor pengambilan keputusan telah terpenuhi.

b. Tingkatan Partisipasi

1. *Non participation*, dari hasil penelitian tingkatan ini telah dilewati oleh masyarakat pada saat pertama kali program keluarga berencana dicanangkan oleh pemerintah.

2. *Tokenism*, dari hasil penelitian tahapan *information* yaitu informasi searah dari pemerintah kepada masyarakat sudah terpenuhi. Lalu tahapan *consultation* yaitu adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, tahapan ini juga

sudah terpenuhi dalam program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan. *Placation* yaitu pemerintah membuat komite kecil sebagai wakilnya di masyarakat. Tahapan ini juga sudah terpenuhi.

3. *Citizen Power*, dari hasil penelitian tahapan *partnership* belum terpenuhi karena belum ada kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dengan kesetaraan wewenang.

c. Faktor yang mempengaruhi partisipasi

Dalam penelitian ini ada enam faktor yang diteliti yaitu:

- a. Pengetahuan Masyarakat, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap program KB. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan pengetahuan masyarakat tidak mempengaruhi partisipasi dalam program KB.
- b. Pekerjaan, yaitu latarbelakang pekerjaan masyarakat berpengaruh terhadap ketersediaan waktu luang untuk berpartisipasi. Dari hasil penelitian faktor pekerjaan juga dinilai kurang berpengaruh.
- c. Pendidikan yaitu latarbelakang pendidikan masyarakat terhadap pola pikir yang berpengaruh pada partisipasi. Dari hasil penelitian, faktor latar belakang pendidikan ini dinilai cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat karena masih banyak masyarakat yang enggan berKB karena khawatir efeksamping dari beberapa alat kontrasepsi.
- d. Jenis kelamin, yaitu pengaruh jenis kelamin terhadap keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa jenis kelamin mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam program hal ini bisa dilihat dari sangat sedikitnya akseptor KB dari kelamin laki-laki.
- e. Kepercayaan terhadap budaya tertentu, yaitu adanya kepercayaan atau adat dari masyarakat yang bersimpangan engan program sehingga mempengaruhi

partisipasi. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor kepercayaan terhadap budaya tertentu ini tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program KB.

- f. Faktor eksternal, yaitu faktor lain yang berasal dari luar masyarakat. Faktor yang berasal dari pemerintah itu sendiri salah satunya. Dari hasil penelitian faktor ini juga tidak mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam program KB.

B. ANALISIS

a. Bentuk Partisipasi

Dari hasil pembahasan mengenai bentuk partisipasi masyarakat, penjelasan mengenai hasil dari tiga indikator utama yang harus dipenuhi dalam syarat menentukan bentuk partisipasi masyarakat pada program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan, yaitu indikator sumbangsih masyarakat terhadap program, penerimaan manfaat program secara merata dan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Syarat utama agar partisipasi dapat digolongkan dalam *authentic participation* adalah terpenuhinya tiga indikator utama, sedangkan jika salah satu dari tiga indikator yang belum terpenuhi maka bentuk partisipasi digolongkan dalam *pseudo-participation*.

Dalam penelitian ini, indikator penerimaan manfaat secara merata oleh masyarakat belum terpenuhi karena memang penerimaan manfaat keluarga berencana belum secara merata dirasakan dan diterima oleh seluruh masyarakat Kecamatan Pedurungan, maka dari itu dapat disimpulkan bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Pedurungan dalam program keluarga berencana berbentuk *pseudo-participation* atau disebut juga partisipasi semu.

b. Tingkatan Partisipasi

Dari hasil pembahasan, bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada

program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan telah berada pada **tingkat partisipasi tokenism** karena pada kondisi program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan telah terpenuhinya tangga *information* berupa komunikasi satu arah dengan media brosur pamflet dan sebagainya memang ada.

Lalu tingkat *consultation* pun telah terpenuhi karena sudah ada kegiatan semacam pertemuan atau dengar pendapat terkait program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan. Begitu juga dengan *placation*, yaitu sudah adanya wakil-wakil dari masyarakat Kecamatan Pedurungan yang ditempatkan pada komite-komite kecil yang terbentuk untuk mengawasi, mengontrol dan menyebarkan informasi mengenai program keluarga berencana. Namun tingkat partisipasi belum berada pada tahap *citizen power* karena tangga terendah dari *citizen power*, yaitu tangga *partnership* belum terpenuhi. Maka dapat diambil kesimpulan tangga-tangga selanjutnya yaitu tangga *delegated power* dan *citizen control* pun belum terpenuhi.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Dari hasil pembahasan mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan, penulis mendapatkan hasil bahwa terdapat tiga faktor yang menurut hasil penelitian menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di Kecamatan Pedurungan. Faktor-faktor tersebut adalah **tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin** dan **faktor eksternal dari stakeholder**.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan yaitu:

a. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Pedurungan dalam program keluarga berencana adalah *pseudo-participation* atau partisipasi semu, hal ini didasarkan pada indikator penerimaan manfaat program kepada masyarakat secara merata belum terpenuhi karena berdasarkan hasil penelitian bahwa masih ada 7989 pasangan usia subur yang belum menjadi peserta aktif KB dari total 32664 pasangan usia subur yang ada di Kecamatan Pedurungan, maka penerimaan manfaat program belum terpenuhi secara merata.

b. Tingkat partisipasi masyarakat

Tingkatan partisipasi masyarakat Kecamatan Pedurungan dalam program keluarga berencana berada pada tingkatan *tokenism*. Tingkatan tokenism disini berada pada derajat dimana adanya komunikasi dua arah antara pihak UPTB Kecamatan Pedurungan dengan masyarakat Kecamatan Pedurungan berupa pertemuan rutin atau rakor yang dilaksanakan berjenjang dari tingkat kecamatan, sampai tingkat paguyuban RT. Pada tingkat ini juga suda adanya komite kecil berjenjang yang dibentuk sebagai wakil dari UPTB Kecamatan Pedurungan. Ditiap komitenya, diwakilkan oleh masyarakat sebagai pengurus komite-komite tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Pedurungan belum sampai pada tingkat *citizen control* karena berdasarkan hasil penelitian bahwa belum ada kemitraan dengan kesetaraan kewenangan antara pemerintah dan masyarakat. Komite-komite yang ada beranggotakan para pengurus rukun tetangga atau rukun warga bekerja secara sosial dan menjalankan tugas berdasarkan program keluarga berencana dari UPTB Kecamatan Pedurungan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Kecamatan

Pedurungan dalam program keluarga berencana meliputi tingkat pendidikan dan buta huruf pada masyarakat, jenis kelamin, dan faktor eksternal yang berasal dari UPTB Kecamatan Pedurungan dan Bapermasper dan KB Kota Semarang. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian bahwa para narasumber mengemukakan latar belakang pendidikan masyarakat sedikit banyak mempengaruhi keputusan mereka untuk berpartisipasi. Begitu juga dengan jenis kelamin yang masih menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah akseptor yang berjenis kelamin laki-laki di Kecamatan Pedurungan.

Faktor eksternal juga mempengaruhi karena dilihat dari hasil penelitian yang berdasarkan pada pendataan yang dinilai kurang valid karena proses pendataan dilakukan oleh tenaga yang belum berkompeten, yaitu tenaga sukarela dari pihak pengurus rukun tetangga atau rukun warga di tiap kelurahan. Kendala lain dari pendataan yang dinilai mempengaruhi yaitu para PLKB Kecamatan Pedurungan masih kurang cakap dalam menggunggah data secara online pada sistem mutakhiran data yang dibuat oleh Bapermasper dan KB kota Semarang.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, maka saran yang akan diberikan adalah :

a. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan kesimpulan bentuk partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana di Kecamatan pedurungan adalah *pseudo-participation* atau partisipasi semu, maka untuk meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat pada bentuk partisipasi yang otentik dibutuhkan intensitas penyuluhan yang lebih rutin dan gencar agar target-target peserta KB yang baru bisa terpenuhi serta

penambahan kuantitas pegawai penyuluh yang berkompeten di UPTB Kecamatan agar bisa menjelaskan lebih mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan alat kontrasepsi yang disediakan pemerintah sehingga masyarakat lebih paham dan tidak lagi khawatir akan efek samping beberapa jenis alat kontrasepsi dan mau menjadi peserta aktif atau akseptor KB.

b. Tingkat partisipasi masyarakat

Berdasarkan kesimpulan tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat tokenism, maka untuk meningkatkan tingkatan partisipasi masyarakat ke tingkat *citizen control* maka pihak UPTB Kecamatan Pedurungan perlu melakukan pelatihan bagi para Kader kelurahan, RW dan RT agar para kader tersebut lebih berkompeten dan bisa diberikan wewenang yang lebih luas dalam pelaksanaan maupun pengawasan program keluarga berencana.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Berdasarkan kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat maka saran yang diberikan yaitu :

- a. Saran untuk faktor latarbelakang pendidikan masyarakat, yang harus dilakukan agar masyarakat tergerak untuk berKB yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang pentingnya keluarga berencana. Menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai kelemahan dan kelebihan dari masing-masing alat kontrasepsi ada agar masyarakat bisa mengerti kebutuhannya dan mengetahui efek samping penggunaan alat kontrasepsi tertentu.
- b. Sama halnya dengan faktor latarbelakang pendidikan masyarakat, faktor jenis kelamin juga sangat mempengaruhi partisipasi KB. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan pemberian sosialisasi mengenai peran laki-laki

dalam program KB juga penting. Memberi pemahaman bahwa metode kontrasepsi untuk laki-laki selain kondom adalah dengan vaksetomi yang efeksampingnya gagal KB lebih kecil, dan pemerintah kota Semarang juga telah menunjuk beberapa rumah sakit di Kota Semarang untuk memfasilitasi vaksetomi secara gratis contohnya di Panti Wiloso dengan berbekal surat keterangan dari puskesmas induk di tiap wilayah kecamatan.

- c. Saran untuk faktor eksternal yaitu dari pihak UPTB Kecamatan Pedurungan yaitu dengan penambahan tenaga petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang lebih peka, berkompeten dan berkomitmen dalam melakukan penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat serta dilakukannya pelatihan dan kursus Teknologi Informasi (TI) kepada para petugas lapangan karena dari hasil pengamatan oleh penulis, dalam sistem pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan oleh UPTB Kecamatan Pedurungan, beberapa petugas terlihat kurang memahami cara input data kedalam aplikasi online yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian : Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Faisal, Sanafiah. 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Matthew and Hubermen M, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press
- Mikkelsen.Britha, 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Alih Bahasa Nalle, Matheos. Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.
- Muluk, M. R. Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia.
- N. Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Ndraha, Taliziduhu. 1994. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2004. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rohman, Ainur. 2009. *Partisipas Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*. Malang : Averroes Press.
- Singarimbun, M., dan Effendi, Sofian. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Yogyakarta : LP3ES.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Monografi dan Profil Kecamatan Pedurungan Tahun 2012.
- Data Peserta Aktif Program Keluarga Berencana Kecamatan Pedurungan Per Juli 2013.
- Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2010-2015.